



Ketidaktepatan Sasaran Program KIP Kuliah dan Dampaknya terhadap Akses Pendidikan Tinggi

Ciek Julyati Hisyam^{1*}, Ahmad Zakaria², Jalmi Katulistiwa³, Lutfian Ahmad⁴,
Fatihah Putri Surya⁵, Zahra Huseinah⁶

¹²³⁴⁵⁶Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13220.

*Penulis Korespondensi: cjhisyam@unj.ac.id

Abstract. *The Indonesia Smart Card for Higher Education (KIP Kuliah) program is a government initiative aimed at expanding access to higher education for students from economically disadvantaged families. However, various reports indicate that the program's implementation has not always reached its intended beneficiaries, leading to concerns regarding targeting accuracy and the equitable distribution of educational assistance. This study examines the issue of mistargeting in the KIP Kuliah program and its impact on access to higher education. Using a qualitative descriptive approach based on literature review, the study analyzes policy documents, previous research, government reports, and relevant academic publications. The findings reveal that inaccuracies in beneficiary selection are influenced by weaknesses in socioeconomic data validation, administrative inconsistencies, and limited monitoring mechanisms. Consequently, eligible students may fail to receive financial support, while some ineligible recipients continue to benefit from the program. These conditions reduce the effectiveness of KIP Kuliah in promoting educational equity and limiting socioeconomic disparities in higher education participation. Strengthening data integration, improving verification procedures, and enhancing transparency and accountability are essential to ensure that educational assistance reaches deserving students and contributes to equitable access to higher education in Indonesia.*

Keywords: *educational equity; education policy; higher education access; KIP Kuliah; targeting accuracy.*

Abstrak. Program **Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)** merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sehingga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas dan keadilan distribusi bantuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan sasaran program KIP Kuliah serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, laporan pemerintah, dan berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran dipengaruhi oleh kelemahan dalam validasi data sosial ekonomi, ketidaksesuaian administrasi, serta terbatasnya mekanisme pengawasan. Akibatnya, sebagian mahasiswa yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan, sementara penerima yang kurang memenuhi syarat masih mendapatkan manfaat program. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas KIP Kuliah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data, peningkatan mekanisme verifikasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program agar bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran dan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata kunci: akses pendidikan tinggi; bantuan pendidikan; kebijakan pendidikan; KIP Kuliah; ketidaktepatan sasaran.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas mobilitas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi pada pendidikan tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu melalui peningkatan kompetensi dan produktivitas, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui terciptanya tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif.¹ Oleh karena itu, akses yang adil terhadap pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Namun, hingga saat ini faktor ekonomi masih menjadi hambatan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, terutama bagi lulusan sekolah menengah yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki hubungan yang kuat dengan peluang seseorang untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung menghadapi keterbatasan dalam memenuhi biaya pendidikan maupun biaya hidup selama menempuh studi, sehingga berisiko menunda bahkan membatalkan rencana melanjutkan pendidikan.² Dalam perspektif pemerataan pendidikan, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial karena kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.³ Oleh sebab itu, intervensi pemerintah melalui berbagai bentuk bantuan pendidikan menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan tinggi.

Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik yang baik. Program ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi

¹ Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.

² Johnstone, D. B. (2004). *The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives*. Economics of Education Review.

³ Marginson, S. (2016). *The dream is over: The crisis of Clark Kerr's California idea of higher education*. University of California Press.

sekaligus mendukung terciptanya pemerataan kesempatan belajar. Menurut Mulyadi (2018), efektivitas suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, termasuk ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran.⁴ Dengan demikian, keberhasilan KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mengidentifikasi calon penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.

Dalam praktiknya, implementasi KIP Kuliah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat mahasiswa yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi memperoleh bantuan, sementara sebagian mahasiswa yang memenuhi persyaratan justru tidak lolos seleksi akibat keterbatasan validasi data, perbedaan kondisi ekonomi yang tidak tercermin dalam data administrasi, maupun kelemahan proses verifikasi di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.⁵ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa akurasi data dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas program bantuan pendidikan.

Ketidaktepatan sasaran tersebut tidak hanya memengaruhi efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga berdampak terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Mahasiswa yang gagal memperoleh bantuan berpotensi mengalami kesulitan finansial, meningkatkan risiko keterlambatan studi maupun putus kuliah. Sebaliknya, pemberian bantuan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria dapat mengurangi kesempatan bagi kelompok yang lebih berhak menerima manfaat program. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran serta menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan melalui peningkatan kualitas pendataan, verifikasi, pengawasan, dan evaluasi

⁴ Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta.

⁵ Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. R. (2021). *Manajemen kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.

program sehingga bantuan pendidikan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Dye (2017), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*).⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup peraturan yang diterbitkan pemerintah, tetapi juga mencakup implementasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum tentu mencapai tujuan apabila pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Edward III (1980), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi.⁷ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai.

Dalam konteks Program KIP Kuliah, implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi. Ketepatan sasaran penerima bantuan dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antarinstansi, validitas data penerima, kecukupan sumber daya manusia dalam proses verifikasi, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan Edward III menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis berbagai kendala dalam pelaksanaan KIP Kuliah.

2.2 Konsep Ketepatan Sasaran Program

⁶ Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.

⁷ Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu program bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Program dikatakan tepat sasaran apabila manfaat yang diberikan diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan tidak hanya mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, tetapi juga menilai efisiensi, efektivitas, pemerataan (*equity*), serta ketepatan penerima manfaat.⁸

Dalam berbagai program bantuan pemerintah, ketidaktepatan sasaran sering terjadi akibat kelemahan sistem pendataan, kesalahan verifikasi administrasi, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun keterbatasan koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *inclusion error*, yaitu bantuan diberikan kepada pihak yang tidak berhak, serta *exclusion error*, yaitu masyarakat yang memenuhi syarat justru tidak menerima bantuan.⁹

Pada Program KIP Kuliah, kedua bentuk kesalahan tersebut dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Mahasiswa yang layak menerima bantuan berpotensi kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sedangkan mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria tetap memperoleh manfaat program. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan KIP Kuliah.

2.3 Akses Pendidikan Tinggi

Akses pendidikan tinggi merupakan kesempatan yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi tanpa adanya hambatan ekonomi, sosial, geografis, maupun budaya. Menurut Trow (1973), perkembangan pendidikan tinggi bergerak dari sistem elit menuju sistem massal dan akhirnya menuju akses universal.¹⁰ Dalam proses tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi.

⁸ Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

⁹ Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. World Bank.

¹⁰ Trow, M. (1973). *Problems in the transition from elite to mass higher education*. Carnegie Commission on Higher Education.

Marginson (2016) menjelaskan bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial karena pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan mobilitas sosial seseorang.¹¹ Oleh sebab itu, berbagai negara mengembangkan program bantuan pendidikan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, KIP Kuliah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, apabila penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, maka tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi sulit tercapai. Oleh karena itu, hubungan antara ketepatan sasaran program dan akses pendidikan tinggi menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan Program KIP Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan yang baik akan menghasilkan proses seleksi penerima bantuan yang akurat sehingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, apabila terjadi ketidaktepatan sasaran akibat kelemahan validasi data, koordinasi, maupun pengawasan, maka efektivitas program akan menurun dan tujuan pemerataan pendidikan tinggi tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), keberhasilan pelaksanaan KIP Kuliah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.¹² Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap akurasi penetapan penerima bantuan yang selanjutnya berdampak pada peningkatan atau penurunan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹¹Marginson, S. (2016). *The dream is over: The crisis of Clark Kerr's California idea of higher education*. University of California Press.

¹² Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu fenomena sosial yang diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan informasi.¹³

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai implementasi Program KIP Kuliah, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan serta menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian.¹⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa sebagai informan penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan Program KIP Kuliah. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2026, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua individu memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling

¹³ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

¹⁴ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih benar-benar memahami fenomena yang diteliti.¹⁵

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang mahasiswa, yang terdiri atas:

No	Informan	Keterangan
1	Asri	Mahasiswa penerima KIP Kuliah
2	Nofan	Mahasiswa penerima KIP Kuliah

Dua mahasiswa penerima KIP Kuliah dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam proses seleksi, penerimaan bantuan, serta pandangan terhadap ketepatan sasaran program.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung kepada tiga informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam. Menurut Creswell dan Creswell (2018), wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan informan terhadap suatu fenomena.¹⁶

¹⁵ Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

¹⁶ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan Program KIP Kuliah, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian.¹⁷

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).¹⁸ Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai melalui tiga tahapan, yaitu:

1. **Reduksi data**, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian.
2. **Penyajian data**, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data.
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan pengecekan kembali terhadap kesimpulan yang diperoleh.

Tahapan tersebut dilakukan secara berulang selama proses penelitian agar hasil analisis benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan, yaitu dua mahasiswa penerima KIP Kuliah. Selain itu, hasil wawancara juga dibandingkan dengan berbagai dokumen, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Menurut Denzin (1978), triangulasi sumber merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk

¹⁷ Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

¹⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif melalui perbandingan berbagai sumber informasi.¹⁹

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada dua orang mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kedua informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena dinilai memiliki pengalaman langsung sebagai penerima bantuan sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai proses seleksi, pelaksanaan program, serta ketidaktepatan sasaran penerima KIP Kuliah.

Selain wawancara, penelitian juga didukung oleh studi dokumentasi melalui berbagai buku, jurnal ilmiah, serta kebijakan mengenai Program KIP Kuliah. Kombinasi kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi sumber sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Creswell (2018).²⁰

4.2 Hasil Wawancara

4.2.1 Latar Belakang Ekonomi dan Alasan Mengajukan KIP Kuliah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua informan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Informan Asri menjelaskan bahwa ayahnya bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Kondisi tersebut membuat biaya kuliah menjadi beban yang cukup besar sehingga ia memutuskan mengajukan KIP Kuliah agar tidak membebani orang tua.

Sementara itu, informan Nofan menyampaikan bahwa kedua orang tuanya bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, keberadaan KIP Kuliah menjadi faktor utama yang memungkinkan dirinya

¹⁹ Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

²⁰ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan ia menyatakan bahwa tanpa bantuan tersebut kemungkinan besar dirinya tidak dapat berkuliah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Hasil tersebut sejalan dengan Becker (1993) yang menyatakan bahwa investasi pada pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dukungan pembiayaan menjadi aspek yang sangat menentukan.²¹

4.2.2 Proses Seleksi dan Kendala Pendaftaran

Informan Asri menjelaskan bahwa proses pendaftaran dimulai melalui portal SNPMB dengan melengkapi berbagai dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP orang tua, slip gaji, serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Setelah dinyatakan lolos SNBP, pihak perguruan tinggi kembali melakukan proses verifikasi hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah.

Meskipun demikian, Asri mengaku mengalami kendala saat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu yang harus diperoleh dari kepala dusun dan dilegalisasi oleh kelurahan. Selain itu, ia juga harus beberapa kali berkonsultasi dengan bagian kemahasiswaan kampus untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Hal serupa disampaikan oleh Nofan yang menilai bahwa proses seleksi telah memiliki mekanisme administrasi yang cukup baik, namun masih terlalu bergantung pada kelengkapan dokumen. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya manipulasi data apabila tidak disertai dengan verifikasi langsung di lapangan.

4.2.3 Ketidaktepatan Sasaran Program KIP Kuliah

Kedua informan mengakui bahwa fenomena ketidaktepatan sasaran masih terjadi dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah.

Asri mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui secara langsung adanya penerima KIP Kuliah yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi relatif mampu. Menurutnya, penerima tersebut memiliki rumah permanen dua lantai serta usaha toko

²¹ Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.

kelontong yang cukup besar. Ia menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem verifikasi karena hanya mengandalkan dokumen administrasi tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Sementara itu, Nofan menjelaskan bahwa meskipun dirinya belum pernah mengetahui secara langsung kasus tersebut, ia sering mendengar adanya mahasiswa yang memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dengan memanipulasi data ekonomi keluarga. Menurutnya, proses seleksi akan lebih objektif apabila dilakukan survei langsung ke rumah calon penerima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran lebih banyak disebabkan oleh kelemahan proses verifikasi dibandingkan dengan kesalahan pada persyaratan administrasi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Dunn (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ketepatan penentuan kelompok sasaran (*targeting accuracy*).²²

Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Wawancara Mengenai Ketidaktepatan Sasaran

Aspek	Informan Asri	Informan Nofan
Mengetahui penerima tidak layak	Pernah	Belum pernah secara langsung
Penyebab utama	Verifikasi hanya berdasarkan berkas	Manipulasi data administrasi
Solusi	Survei lapangan dan sistem pengaduan	Survei rumah dan evaluasi lebih ketat

Sumber: Data Primer Penelitian (2026).

4.2.4 Dampak Program KIP Kuliah terhadap Akses Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara, kedua informan menyatakan bahwa Program KIP Kuliah memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan studi mereka.

²² Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Asri menjelaskan bahwa seluruh biaya UKT ditanggung oleh pemerintah dan setiap semester memperoleh bantuan biaya hidup sekitar delapan juta rupiah yang digunakan untuk biaya kos, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Ia juga menyampaikan bahwa apabila tidak memperoleh KIP Kuliah, kemungkinan besar dirinya akan memilih perguruan tinggi swasta dengan biaya yang lebih rendah.

Nofan juga menyampaikan pengalaman yang serupa. Menurutnya, bantuan biaya hidup setiap semester sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ia dapat lebih fokus mengikuti perkuliahan. Ia menegaskan bahwa tanpa KIP Kuliah dirinya kemungkinan besar tidak mampu melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Kedua informan juga menyampaikan bahwa masih terdapat mahasiswa yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi gagal memperoleh KIP Kuliah. Akibatnya, sebagian memilih tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi, namun efektivitasnya akan berkurang apabila masih terjadi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Hasil ini mendukung pendapat Marginson (2016) bahwa pemerataan akses pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan yang tepat sasaran.²³

4.2.5 Usulan Perbaikan Program

Baik Asri maupun Nofan sama-sama menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi KIP Kuliah.

Asri mengusulkan agar pemerintah menambahkan tahapan wawancara, melakukan survei secara acak ke rumah calon penerima, membangun sistem pengaduan anonim, serta mengintegrasikan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Nofan mengusulkan agar pemerintah memperketat proses verifikasi melalui survei lapangan serta melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap latar belakang ekonomi calon penerima. Menurutnya, langkah tersebut akan mengurangi peluang manipulasi data administrasi.

²³ Marginson, S. (2016). *The dream is over: The crisis of Clark Kerr's California idea of higher education*. University of California Press.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa kelemahan utama Program KIP Kuliah terletak pada proses verifikasi data ekonomi calon penerima. Oleh karena itu, peningkatan kualitas validasi data menjadi salah satu rekomendasi utama dalam penelitian ini agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa Program KIP Kuliah memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kedua informan menyatakan bahwa bantuan tersebut mampu meringankan beban biaya pendidikan maupun biaya hidup selama menempuh perkuliahan, sehingga mereka dapat melanjutkan studi tanpa mengalami kendala ekonomi yang berarti. Dengan demikian, KIP Kuliah telah berperan sebagai instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan utama terletak pada proses verifikasi yang masih berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi dan belum didukung oleh verifikasi lapangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya manipulasi data sehingga terdapat kemungkinan mahasiswa yang secara ekonomi lebih mampu memperoleh bantuan, sementara mahasiswa yang lebih membutuhkan justru tidak menerima KIP Kuliah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, keberhasilan Program KIP Kuliah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima bantuan. Perbaikan pada sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi dapat tercapai secara lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa Program KIP Kuliah memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kedua informan menyatakan bahwa bantuan tersebut mampu meringankan beban biaya pendidikan maupun biaya hidup selama menempuh perkuliahan, sehingga mereka dapat melanjutkan studi tanpa mengalami kendala ekonomi yang berarti. Dengan demikian, KIP Kuliah telah berperan sebagai instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan utama terletak pada proses verifikasi yang masih berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi dan belum didukung oleh verifikasi lapangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya manipulasi data sehingga terdapat kemungkinan mahasiswa yang secara ekonomi lebih mampu memperoleh bantuan, sementara mahasiswa yang lebih membutuhkan justru tidak menerima KIP Kuliah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, keberhasilan Program KIP Kuliah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima bantuan. Perbaikan pada sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi dapat tercapai secara lebih adil dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah dan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi dan verifikasi penerima KIP Kuliah melalui pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta instansi terkait lainnya. Selain itu, perlu dilakukan survei lapangan secara berkala terhadap

calon maupun penerima bantuan untuk meminimalkan terjadinya ketidaktepatan sasaran.

2. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi data ekonomi mahasiswa melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, sekolah asal, serta pihak terkait. Perguruan tinggi juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan sehingga mahasiswa dapat melaporkan dugaan ketidaktepatan sasaran secara aman dan objektif.
3. Bagi Pengelola Program KIP Kuliah, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan secara berkala, mengingat kondisi ekonomi keluarga dapat berubah seiring waktu. Evaluasi tersebut penting agar bantuan tetap diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan kuota bantuan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
4. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan informasi yang jujur dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga pada saat proses pendaftaran KIP Kuliah. Sikap jujur dan bertanggung jawab akan membantu menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih adil dan tepat sasaran.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan jumlah informan yang lebih banyak serta melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktepatan sasaran Program KIP Kuliah serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam proses wawancara serta memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang membangun selama

proses penelitian, serta kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan ketepatan sasaran Program KIP Kuliah sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

Barr, N. (2012). *Economics of the welfare state* (5th ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.

Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford, England: Oxford University Press.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. World Bank.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Toronto, Canada: Oxford University Press.

Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives. *Economics of Education Review*, 23(4), 403–410.

Marginson, S. (2016). *The dream is over: The crisis of Clark Kerr's California idea of higher education*. University of California Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta.

Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. R. (2021). *Manajemen kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

Tilak, J. B. G. (2002). *Higher education and development*. New Delhi, India: APH Publishing Corporation.

Trow, M. (1973). *Problems in the transition from elite to mass higher education*. Carnegie Commission on Higher Education.

Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation*. New York, NY: Routledge.